



Opini

Senin, 07 November 2005

Rubrik

- [Berita Utama](#)
- [Metropolitan](#)
- [Nusantara](#)
- [Bisnis & Keuangan](#)
- [International](#)
- [Opini](#)
- [Olahraga](#)
- [Politik & Hukum](#)
- [Humaniora](#)
- [Jawa Barat](#)
- [Sosok](#)
- [Sumatera Bagian Utara](#)
- [Sumatera Bagian Selatan](#)
- [Lebaran](#)
- [Berita Yang lalu](#)
- [Otonomi](#)
- [Ilmu Pengetahuan](#)
- [Pergelaran](#)
- [Audio Visual](#)
- [Rumah](#)
- [Teropong](#)
- [Teknologi Informasi](#)
- [Muda](#)
- [Swara](#)
- [Pendidikan Dalam Negeri](#)
- [Musik](#)
- [Sorotan](#)
- [Dana Kemanusiaan](#)
- [Properti](#)
- [Bentara](#)
- [Wisata](#)
- [Fokus](#)
- [Telekomunikasi](#)
- [Ekonomi Rakyat](#)
- [Pustakaloka](#)
- [Jendela](#)
- [Ekonomi Internasional](#)
- [Bahari](#)
- [Pendidikan Luar Negeri](#)
- [Otomotif](#)
- [Furnitur](#)
- [Makanan dan Minuman](#)
- [Perbankan](#)
- [Pendidikan](#)

Udang di Balik Teror?

Ariel Heryanto

Berbeda dari situasi di Indonesia, umumnya publik internasional termakan propaganda bahaya terorisme mutakhir.

Meski berbeda pandangan dalam beberapa hal (misalnya mengapa Barat dibenci, atau bagaimana menanggapi terorisme), sebagian besar percaya, terorisme mutakhir merupakan gerakan militansi sekelompok Islam lintas negara.

Diskriminasi

Meski pemerintahan Bush (AS), Blair (Inggris), dan Howard (Australia) berkali-kali menyatakan yang mereka musuhi bukan Islam, diskriminasi terjadi terhadap mereka yang bertampang (busana, warna kulit, jenis rambut, nama pribadi). Nasib mereka mengingatkan kita pada minoritas Tionghoa di Indonesia.

Begitu kuatnya keyakinan umum tentang identitas "teroris", sampai-sampai ia menjadi fanatisme. Berbagai kebijakan dan tindakan "antiterorisme" yang diterjemahkan dari sikap fanatik, tampil sebagai sebuah militansi.

Pertengahan Oktober lalu, keyakinan yang membeku di sebagian publik Australia sempat terguncang. Pemicunya, laporan penelitian jurnalistik tentang terorisme di Indonesia. Isinya menjungkirbalikkan logika dan pandangan umum. Laporan Inside Indonesia: War on Terror itu disusun David O'Shea, disiarkan dalam Dateline (jaringan televisi SBS, 12/10/2005).

Intinya, laporan menyangsikan dugaan pihak di balik berbagai ledakan bom di Indonesia. Yang dijadikan tertuduh utama dalam laporan 40 menit itu bukan Kelompok Jemaah Islamiyah, tetapi oknum atau aparat negara yang seharusnya paling bertanggung jawab menghalangi, melawan, dan menghukum terorisme, yakni tentara, polisi, dan intelijen.

Para pelaku peledakan bom tidak lebih dari anak-anak muda yang dipakai organisasi "teroris", yang ujungnya ke markas aparat keamanan. Identitas para tokoh negara yang dituduh dalam laporan ini disebut jelas dengan gambar dan wawancara.

Bukti dan data dalam laporan itu punya validitas berbeda-beda, dan ini diakui penyusunnya. Ada bukti tertulis yang meyakinkan, ada saksi mata dan analisis orang lain. Yang jelas, semua bersumber dari orang Indonesia, dengan beragam latar belakang: politikus, petugas keamanan, akademikus, peneliti swasta, pemuka agama, pedagang pasar, pengungsi kerusuhan lokal, bahkan beberapa mantan anggota kelompok yang disebut "teroris" itu sendiri.

- ▶ Didaktika
- ▶ Pixel
- ▶ Bingkai
- ▶ Pendidikan Informal
- ▶ Lingkungan
- ▶ Lintas Timur Barat
- ▶ Perhubungan
- ▶ Interior
- ▶ Tanah Air
- ▶ Kesehatan
- ▶ Info Otonomi
- ▶ Tentang Kompas
- ▶ Kontak Redaksi

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Meski beragam latar belakang, semua memberi masukan yang saling melengkapi dan menguatkan dugaan terlibatnya aparat dalam berbagai aksi bom. Bagi publik Australia, laporan itu menggugah dua hal.

Pertama, tuduhan dari seorang politikus berwibawa Indonesia tentang kemungkinan terlibatnya aparat keamanan dalam beberapa bom yang menewaskan beberapa warga Australia. Tetapi laporan itu menekankan, selama bertahun-tahun derita rakyat Indonesia lebih besar dan tidak diberitakan media internasional.

Kedua, sambil menunjukkan dugaan kejahatan oleh aparat keamanan, laporan ini menggambarkan para pejabat tinggi yang sama menikmati banjir dana bantuan dari luar negeri atas nama "perang terhadap terorisme".

Kesimpulan dari laporan ini, para pejabat keamanan negara tidak akan pernah berhasil (kalau pun diandaikan mereka pernah berniat) membasmi berbagai gerakan teror di Tanah Air secara tuntas. Justru mereka membina, memelihara, dan membiayainya, sebab mereka diuntungkan secara ekonomis maupun politis.

Memperkuat kecurigaan

Tuduhan semacam itu tentu amat berat dan serius. Kita berharap segera ada bantahan disertai bukti-bukti yang lebih unggul. Hingga kini, yang terjadi di SBS justru memperkuat kecurigaan orang.

Rekaman acara Dateline yang sudah disiarkan biasanya disediakan pada situs web SBS. Semua acara yang disiarkan sebelum dan sesudah 12 Oktober tersedia. Tetapi laporan yang provokatif itu mendadak lenyap setelah sempat dipasang beberapa hari. Apakah pemerintahan Howard menekan SBS seperti di Indonesia zaman Orde Baru? Apakah pemerintahan Howard diuntungkan perang terhadap "teror"?

Tidak ada penjelasan dari SBS. Tetapi SBS menyiarkan berbagai kecaman "surat pemirsa" yang menuduh terjadi sensor, dan menyebutkan berbagai situs lain yang menyediakan transkrip siaran itu. Untung, UU antiteror Australia (2005) belum diberlakukan.

Ariel Heryanto Dosen di *The University of Melbourne, Australia*